

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program kebijakan, diantaranya berupa program bantuan sosial dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang telah dialokasikan juga sudah sangat besar. Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi dengan Prosentase penduduk miskin tertinggi kedua di Indonesia. Fakta dilapangan menunjukan bahwa penurunan kemiskinan di Provinsi Papua Barat sangat lambat dan tidak berarti, sekalipun jumlah anggaran yang diberikan lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi program penganggulan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Temuan dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat dari segi isi kebijakan (*content of policy*), berupa kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan dan sumberdaya yang dibutuhkan masih sangat rendah atau belum tepat sasaran, terkecuali untuk pelaksanaan program dinilai cukup berhasil. Selanjutnya untuk lingkungan kebijakan (*contex of implementation*) mendukung sepenuhnya atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan teori, tetapi perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif agar akar permasalahan terkait kemiskinan dapat sepenuhnya teratasi.

**Kata Kunci :** Kemiskinan, Implementasi, Program penanggulangan kemiskinan.

## ABSTRACT

Poverty is a problem in Indonesia that has not yet been resolved. In tackling poverty, the central government and local governments have made various efforts in the form of policy programs, including social assistance programs and accelerated poverty reduction programs. The budget that has been allocated is also very large. West Papua Province is the province with the second highest percentage of poor people in Indonesia. Facts on the ground show that poverty reduction in West Papua Province is very slow and meaningless, even though the amount of budget allocated is more.

The objectives of this research are to describe the implementation of poverty reduction programs in West Papua Province. This study uses a qualitative method with a case study approach that aims to describe the implementation of poverty alleviation programs in West Papua Province. Data collection is done by collecting information through observation and interviews, both structured and unstructured, documentation, visual materials, as well as efforts to design protocols to record or record information. The findings of this study are that the implementation of poverty reduction programs in West Papua Province has not been optimal in terms of policy content, in the form of the interests of the target group, the types of benefits provided, the degree of desired change, the location of decision making and the resources needed are still very low. or not yet on target, except for the implementation of the program which is considered quite successful. Furthermore, the policy environment (context of implementation) fully supports or is in accordance with what is expected according to theory, but a more in-depth and comprehensive study is needed so that the root causes of poverty can be completely resolved.

**Keywords:** Poverty, Implementation, Poverty Reduction Program.